

PENGELOLAAN DANA BANTUAN PERTANIAN PEMERINTAH DI DINAS TANAMAN PANGAN HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN KABUPATEN JEMBER BERDASARKAN REALISASI ANGGARAN

Desvita Indah Barokah^{1*}, Fitriyatus Soleha², Mita Nurhaliza³

¹ Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

^{2,3} Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

desviiiita3@gmail.com, mitanurhaliza258@gmail.com, solehafitri243@gmail.com

Abstrak: Pengabdian masyarakat bertujuan untuk meningkatkan pemahaman petani mengenai pengelolaan dana bantuan pertanian melalui metode sosialisasi. Kegiatan ini dilaksanakan di Kabupaten Jember dengan melibatkan petani sebagai peserta utama. Metode yang digunakan mencakup sosialisasi langsung, diskusi kelompok, dan distribusi materi edukatif mengenai pengelolaan dana yang efisien dan transparan. Hasil dari kegiatan ini menunjukkan peningkatan pengetahuan petani tentang pentingnya pengelolaan dana yang baik, serta cara-cara untuk memanfaatkan bantuan pertanian secara optimal. Diharapkan, melalui sosialisasi ini, petani dapat lebih mandiri dalam mengelola dana bantuan dan meningkatkan produktivitas pertanian mereka, yang pada gilirannya akan berkontribusi pada ketahanan pangan di daerah tersebut.

Kata Kunci: Pengabdian masyarakat, sosialisasi, pengelolaan dana, bantuan pertanian, ketahanan pangan.

Abstract: The community service project aims to enhance farmers' understanding of the management of agricultural assistance funds through a socialization method. The activity was conducted in Jember Regency, involving farmers as the main participants. The methods used include direct socialization, group discussions, and the distribution of educational materials regarding efficient and transparent fund management. The results of this activity indicate an increase in farmers' knowledge about the importance of good fund management, as well as ways to optimally utilize agricultural assistance. It is expected that through this socialization, farmers can become more independent in managing assistance funds and improve their agricultural productivity, which in turn will contribute to food security in the region.

Keywords: Community service, socialization, fund management, agricultural assistance, food security.

Article History:

Received	Revised	Published
25 Januari 2025	10 Maret 2025	15 Maret 2025

Pendahuluan

Peningkatan kesejahteraan petani melalui bantuan pemerintah merupakan salah satu strategi penting dalam sektor pertanian di Indonesia, termasuk di Kabupaten Jember. Sebagai daerah yang mayoritas penduduknya bergantung pada sektor pertanian, keberadaan bantuan dari pemerintah dapat memberikan dampak yang signifikan terhadap produktivitas dan kesejahteraan masyarakat tani.

Dana bantuan pertanian yang disalurkan oleh pemerintah memiliki peran krusial dalam mendukung kegiatan produksi pertanian, pengadaan alat-alat pertanian, penyuluhan, serta distribusi bahan pokok pertanian yang dibutuhkan oleh petani. Namun, meskipun dana bantuan tersebut diharapkan dapat meningkatkan hasil pertanian dan pendapatan petani, efektivitas penggunaan dana tersebut tidak selalu dapat dipastikan.

Di Kabupaten Jember, Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan memiliki tanggung jawab dalam pengelolaan dana bantuan pertanian yang diterima oleh petani dan kelompok tani. Pengelolaan yang efektif dan transparan sangat penting agar bantuan tersebut dapat dimanfaatkan dengan optimal, sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Oleh karena itu, diperlukan analisis yang mendalam mengenai bagaimana dana bantuan pertanian dikelola, alokasi dan distribusinya, serta dampak yang dihasilkan terhadap hasil pertanian dan peningkatan kesejahteraan petani.

Selain itu, pengelolaan dana bantuan yang tidak tepat sasaran atau tidak efisien dapat menyebabkan dana tersebut tidak dapat dimanfaatkan secara maksimal, bahkan dapat berdampak buruk bagi petani yang seharusnya memperoleh manfaat dari bantuan tersebut. Oleh karena itu, penting untuk melakukan evaluasi terhadap proses pengelolaan dana bantuan pertanian yang ada di Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Jember guna mengidentifikasi apakah pengelolaan yang dilakukan sudah sesuai dengan tujuan dan harapan yang diinginkan.

Metode

Metode pengabdian yang tepat untuk meningkatkan pemahaman petani mengenai pengelolaan dana bantuan pertanian adalah sebagai berikut:

1. Identifikasi Masalah: Melakukan identifikasi terhadap permasalahan yang ada dalam pengelolaan dana bantuan pertanian, termasuk efektivitas dan efisiensi penggunaan dana tersebut.
2. Sosialisasi Langsung: Mengadakan pertemuan tatap muka dengan petani untuk memberikan informasi mengenai pengelolaan dana bantuan secara langsung.
3. Diskusi Kelompok: Mengorganisir sesi diskusi kelompok untuk mendorong partisipasi aktif petani dalam berbagi pengalaman dan tantangan yang mereka hadapi dalam pengelolaan dana.
4. Wawancara Mendalam: Melakukan wawancara dengan petani penerima bantuan dan pegawai Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan untuk menggali informasi mengenai pengalaman mereka dalam proses pengelolaan dan penggunaan dana bantuan.
5. Distribusi Materi Edukatif: Menyediakan materi edukatif yang menjelaskan cara-cara pengelolaan dana yang efisien dan transparan, serta manfaat dari pengelolaan yang baik.
6. Evaluasi dan Umpan Balik: Mengumpulkan umpan balik dari petani mengenai pemahaman mereka setelah sosialisasi dan diskusi, serta melakukan evaluasi untuk meningkatkan metode di masa mendatang.
7. Sosialisasi Hasil: Melakukan sosialisasi hasil pengabdian kepada pihak terkait, termasuk Dinas Tanaman Pangan, untuk memastikan bahwa rekomendasi yang dihasilkan dapat diimplementasikan secara efektif.

Metode ini diharapkan dapat meningkatkan pemahaman petani tentang pengelolaan dana bantuan dan mendukung ketahanan pangan di daerah tersebut.

Hasil dan Pembahasan

Dalam pelaksanaan kerja, peserta PPL diberikan tugas yang berkaitan dengan aktivitas di Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Jember. Berikut ini tugas yang dikerjakan oleh peserta PPL selama melaksanakan Praktik Pengalaman Lapangan (PPL)

pada bagian umum dan kepegawaian, perencanaan dan keuangan di Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Jember:

1. Menghitung Model DK (Data Kinerja)

Model Data Kinerja adalah kerangka atau sistem yang digunakan untuk mengukur, memantau, dan mengevaluasi kinerja individu, tim, atau organisasi. Dalam konteks dinas pemerintahan, model ini biasanya digunakan untuk mengevaluasi pencapaian target kerja pegawai atau organisasi sesuai dengan Indikator Kinerja Utama (IKU) atau Sasaran Kinerja Pegawai (SKP).

2. Menyusun LRA (Laporan Realisasi Anggaran)

Penyusunan realisasi anggaran di Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan (Dinas TPHP) dilakukan melalui tahapan perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan sesuai dengan regulasi pemerintah. Pada tahap perencanaan, anggaran disusun berdasarkan program kerja yang telah ditetapkan dan dituangkan dalam dokumen APBD atau APBN. Selanjutnya, pelaksanaan anggaran dilakukan sesuai dengan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dengan memastikan penggunaan dana berjalan efektif dan efisien, seperti dalam program bantuan pertanian, subsidi pupuk, dan peningkatan kapasitas petani. Proses ini diawasi melalui monitoring dan evaluasi berkala guna memastikan kesesuaian realisasi dengan anggaran yang telah direncanakan. Hasil realisasi anggaran kemudian dilaporkan dalam bentuk Laporan Realisasi Anggaran (LRA) yang digunakan sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada pemerintah daerah, kementerian terkait, dan lembaga audit seperti Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

3. Menyusun Neraca Saldo

Neraca saldo adalah daftar yang mencatat saldo semua akun dalam buku besar pada suatu periode akuntansi tertentu. Neraca saldo disusun untuk memastikan keseimbangan antara total saldo debit dan kredit sebelum menyusun laporan keuangan. Dalam penyusunannya, neraca saldo biasanya mencakup akun-akun seperti kas, piutang, persediaan, utang, modal, pendapatan, dan beban. Jika jumlah total debit dan kredit dalam neraca saldo tidak seimbang, maka terdapat kemungkinan kesalahan pencatatan yang perlu diperbaiki melalui proses penyesuaian. Neraca saldo menjadi dasar dalam penyusunan laporan keuangan seperti neraca, laporan laba rugi, dan laporan perubahan modal.

4. Menyusun Laporan Operasional

Laporan operasional adalah laporan keuangan yang menggambarkan pendapatan, beban, surplus/defisit, dan kinerja keuangan suatu entitas dalam satu periode tertentu. Laporan ini umumnya digunakan oleh instansi pemerintah, organisasi nirlaba, dan entitas sektor publik untuk menunjukkan efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran dalam menjalankan program atau kegiatan. Struktur laporan operasional biasanya mencakup pendapatan dari sumber seperti pajak, retribusi, atau hibah, serta beban operasional yang meliputi biaya pegawai, barang dan jasa, serta penyusutan aset. Hasil akhirnya menunjukkan surplus atau defisit yang mencerminkan keberlanjutan fiskal suatu entitas. Laporan ini berfungsi sebagai alat transparansi dan akuntabilitas bagi pemangku kepentingan dalam mengevaluasi kinerja organisasi atau instansi terkait.

5. Mengevaluasi Bukti Pengeluaran Barang

Evaluasi bukti pengeluaran barang adalah proses pemeriksaan dan verifikasi dokumen yang terkait dengan pengeluaran barang untuk memastikan bahwa transaksi telah dilakukan sesuai prosedur, anggaran, dan ketentuan yang berlaku.

Evaluasi ini mencakup pengecekan dokumen seperti nota pembelian, faktur, kwitansi, berita acara serah terima barang (BAST), serta bukti penerimaan barang. Proses evaluasi meliputi validasi kesesuaian jumlah dan spesifikasi barang dengan dokumen, verifikasi tanda tangan pihak yang berwenang, serta pengecekan apakah transaksi tersebut telah dicatat dalam sistem keuangan. Evaluasi ini penting untuk menghindari kecurangan, memastikan efisiensi penggunaan anggaran, serta mempermudah proses audit dan pelaporan keuangan.

Pengelolaan dana bantuan pertanian pemerintah di Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Jember memiliki peranan yang sangat penting dalam mendukung keberlanjutan dan pengembangan sektor pertanian di daerah Jember. Pengelolaan dana ini sangat bergantung pada efisiensi dan efektivitas penggunaan anggaran, yang tercatat dalam laporan realisasi anggaran. Pembahasan ini akan menganalisis bagaimana pengelolaan dan bantuan pertanian dilakukan, berdasarkan data dari realisasi anggaran yang ada

1. Dana Bantuan Pertanian Pemerintah

Dana bantuan pertanian pemerintah adalah salah satu instrumen penting yang digunakan untuk mendukung sektor pertanian di Indonesia. Dana ini diperoleh dari anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) dan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD), yang dialokasikan untuk berbagai kegiatan di sektor pertanian. Alokasi dana tersebut bertujuan untuk meningkatkan produktivitas pertanian, memperkuat ketahanan pangan, dan kesejahteraan petani.

2. Tujuan Bantuan Dana Pengelolaan Pemerintah

Pengelolaan dana bantuan pemerintah memiliki tujuan yang sangat penting untuk memastikan bahwa dana yang dialokasikan untuk sektor-sektor tertentu dapat digunakan secara efisien, efektif, dan tepat sasaran. Tujuan utama dari pengelolaan dana bantuan pemerintah adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, khususnya mereka yang membutuhkan, dengan mengurangi kesenjangan sosial dan ekonomi.

3. Realisasi anggaran

Realisasi Anggaran dalam konteks keuangan merujuk pada sejauh mana dana yang telah dialokasikan dalam anggaran negara atau daerah telah digunakan untuk keperluan yang telah direncanakan. Realisasi anggaran menggambarkan pengeluaran yang telah dilaksanakan dibandingkan dengan anggaran yang telah ditetapkan sebelumnya. Proses ini penting untuk memastikan bahwa dana yang direncanakan dalam anggaran benar-benar digunakan dengan efektif dan efisien sesuai dengan prioritas pembangunan yang telah ditetapkan.

Dalam dunia pemerintahan dan keuangan, realisasi anggaran sering kali menjadi ukuran keberhasilan atau efektivitas dari pelaksanaan anggaran. Anggaran yang terealisasi dengan baik akan memastikan tercapainya tujuan pembangunan, seperti peningkatan kesejahteraan masyarakat, pembangunan infrastruktur, dan penguatan sektor-sektor penting lainnya, seperti pendidikan, kesehatan, dan pertanian. Salah satu aspek penting dalam realisasi anggaran adalah pengawasan dan akuntabilitas. Penggunaan anggaran harus dipantau secara ketat untuk menghindari penyalahgunaan atau pemborosan. Dalam laporan keuangan, realisasi anggaran juga sering kali disajikan dalam bentuk perbandingan antara anggaran yang telah disetujui dan anggaran yang telah digunakan, yang disebut dengan Anggaran Realisasi.

4. Realisasi anggaran dalam sektor pertanian

Realisasi anggaran yang tepat adalah hal lain yang sangat penting. Dalam konteks sektor pertanian, realisasi anggaran berarti bahwa dana yang telah dialokasikan dalam anggaran negara harus digunakan sesuai dengan yang direncanakan. Anggaran yang tidak terealisasi dengan baik atau tidak digunakan sesuai peruntukannya akan menghambat pencapaian tujuan pembangunan yang telah ditargetkan. Oleh karena itu, penting untuk memiliki pengawasan yang baik terhadap penggunaan dana bantuan pemerintah, baik dari pemerintah pusat maupun daerah.

Penggunaan dana yang transparan dan akuntabel adalah hal yang krusial untuk menghindari potensi penyalahgunaan dana. Pengawasan yang ketat dan akuntabilitas dalam penggunaan dana membantu memastikan bahwa bantuan tersebut sampai ke petani yang membutuhkan dan digunakan dengan cara yang efisien. Oleh karena itu, para pemangku kepentingan, seperti pemerintah, lembaga keuangan, dan organisasi petani, harus bekerja sama dalam memastikan pengelolaan dana bantuan dilakukan dengan baik dan sesuai prosedur.

Selain itu, dengan adanya sistem transparansi, setiap alokasi dana dan laporan penggunaan dana dapat diakses oleh publik dan stakeholder terkait, yang akan meningkatkan akuntabilitas dan mengurangi risiko korupsi atau penyelewengan. Penerapan sistem pelaporan dan evaluasi yang teratur juga akan memastikan bahwa hasil dari penggunaan dana bantuan tersebut dapat dipantau dan dievaluasi untuk mengetahui apakah tujuan awal tercapai atau perlu adanya perbaikan dalam pengelolaannya.

Dengan pendekatan yang tepat dalam pengelolaan dana bantuan pemerintah, diharapkan dampak positif yang dapat diperoleh adalah peningkatan produktivitas pertanian, kemajuan teknologi pertanian yang lebih modern, dan pada akhirnya, peningkatan kesejahteraan petani secara menyeluruh. Semua ini akan memberikan kontribusi terhadap pencapaian ketahanan pangan nasional yang lebih baik dan berkelanjutan.

Model Data Kinerja (DK) adalah alat yang digunakan untuk mengukur dan mengevaluasi kinerja individu, tim, atau organisasi secara sistematis berdasarkan data yang ada. Model ini dirancang untuk membantu organisasi dalam memantau dan meningkatkan kinerja dengan cara menetapkan indikator yang jelas, mengumpulkan data terkait, dan melakukan analisis terhadap pencapaian tersebut.

Tujuan Model Data Kinerja (DK):

1. Mengukur Kinerja

Mengukur kinerja dapat dilakukan dengan membandingkan hasil yang dicapai dengan tujuan atau standar yang telah ditetapkan sebelumnya. Di lingkungan pemerintahan, misalnya, pencapaian kinerja pegawai diukur dengan Indikator Kinerja Utama (IKU) atau Sasaran Kinerja Pegawai (SKP).

2. Memantau dan Mengevaluasi

Data yang terkumpul membantu dalam proses evaluasi kinerja pegawai, tim, atau organisasi. Ini memungkinkan manajemen untuk mengetahui apakah strategi atau kebijakan yang diterapkan efektif atau perlu disesuaikan.

3. Pengambilan Keputusan yang Lebih Baik

Dengan data kinerja yang jelas, manajemen dapat mengambil keputusan berbasis fakta. Keputusan yang diambil menjadi lebih tepat karena sudah dilandasi dengan data yang relevan.

4. Peningkatan Kinerja

Dengan menggunakan data kinerja, organisasi bisa mengidentifikasi area yang perlu perbaikan dan merancang kebijakan atau pelatihan yang diperlukan untuk meningkatkan kinerja.

Langkah-langkah dalam Model Data Kinerja:

1. Penentuan Indikator Kinerja

Langkah pertama adalah menetapkan indikator yang relevan dengan tujuan yang ingin dicapai. Indikator tersebut harus jelas, terukur, dan sesuai dengan kebutuhan organisasi. Dalam konteks pemerintahan, indikator ini sering kali mencakup aspek efisiensi, efektivitas, dan kualitas layanan publik.

2. Pengumpulan Data

Setelah indikator ditetapkan, langkah berikutnya adalah mengumpulkan data terkait pencapaian kinerja. Data ini bisa diperoleh melalui survei, observasi, wawancara, laporan bulanan, atau sistem informasi yang ada.

3. Analisis Data

Data yang dikumpulkan harus dianalisis untuk menentukan apakah kinerja sudah sesuai dengan target yang diharapkan. Proses analisis ini melibatkan perbandingan antara hasil yang dicapai dan standar yang telah ditetapkan.

4. Pelaporan dan Tindak Lanjut

Hasil analisis kinerja dilaporkan kepada pihak terkait, dan tindak lanjut dilakukan berdasarkan temuan analisis. Tindak lanjut bisa berupa perubahan kebijakan, penyusunan pelatihan, atau pengembangan kompetensi SDM.

Penyusunan Laporan Realisasi Anggaran (LRA) adalah salah satu proses penting dalam manajemen keuangan publik, terutama dalam sektor pemerintahan. LRA berfungsi untuk menunjukkan sejauh mana anggaran yang telah direncanakan dapat terealisasi dalam pelaksanaannya. Pada Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan (Dinas TPHP), penyusunan LRA dilakukan melalui tahapan perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan sesuai dengan regulasi yang berlaku, seperti yang tercantum dalam APBD atau APBN.

Tahapan Penyusunan LRA:

1. Tahap Perencanaan

Pada tahap ini, anggaran disusun berdasarkan prioritas program yang telah ditetapkan sebelumnya. Dalam hal ini, Dinas TPHP harus merencanakan program kerja yang tepat dan sesuai dengan kebutuhan sektor pertanian, seperti program bantuan pertanian, subsidi pupuk, atau pelatihan peningkatan kapasitas petani. Anggaran yang direncanakan ini kemudian dituangkan dalam dokumen Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) jika terkait dengan dana pusat.

2. Tahap Pelaksanaan

Setelah anggaran direncanakan dan disetujui, anggaran tersebut kemudian digunakan sesuai dengan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA). Pada tahap pelaksanaan ini, Dinas TPHP perlu memastikan bahwa dana yang diterima digunakan dengan efektif dan efisien, sesuai dengan rencana yang telah disusun. Penggunaan anggaran meliputi berbagai kegiatan, seperti program bantuan pertanian, pembelian subsidi pupuk, hingga pelatihan untuk meningkatkan kapasitas petani. Monitoring dan evaluasi dilakukan secara berkala untuk memastikan bahwa anggaran yang digunakan sesuai dengan rencana yang ada.

3. Tahap Pelaporan

Setelah pelaksanaan anggaran, hasil realisasi anggaran kemudian dilaporkan dalam bentuk Laporan Realisasi Anggaran (LRA). Laporan ini berfungsi sebagai pertanggungjawaban kepada pihak-pihak terkait, seperti pemerintah daerah, kementerian, dan lembaga audit seperti Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). LRA harus menggambarkan secara jelas seberapa banyak anggaran yang telah digunakan, seberapa efisien dan efektif penggunaan anggaran tersebut, serta apakah pelaksanaan anggaran sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan.

Manfaat Penyusunan LRA

Penyusunan dan pelaporan LRA yang akurat sangat penting untuk menjaga transparansi dan akuntabilitas penggunaan anggaran di sektor pemerintahan. LRA menjadi acuan untuk melakukan evaluasi terhadap pencapaian tujuan program, serta untuk melakukan perbaikan atau penyesuaian anggaran di masa yang akan datang. Laporan ini juga penting untuk memastikan bahwa anggaran yang digunakan telah sesuai dengan prinsip-prinsip efisiensi, efektivitas, dan akuntabilitas.

Penyusunan Laporan Operasional:

Laporan operasional adalah laporan keuangan yang memberikan gambaran tentang pendapatan, beban, surplus/defisit, dan kinerja keuangan suatu entitas dalam periode tertentu. Biasanya, laporan operasional ini digunakan oleh instansi pemerintah, organisasi nirlaba, dan entitas sektor publik untuk menilai efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran dalam menjalankan program dan kegiatan. Laporan ini penting sebagai alat transparansi dan akuntabilitas, terutama untuk pemangku kepentingan yang ingin mengevaluasi kinerja keuangan entitas.

Proses Penyusunan Laporan Operasional:

1. Pendapatan:

Laporan operasional dimulai dengan pencatatan pendapatan yang diperoleh oleh entitas, yang berasal dari berbagai sumber seperti pajak, retribusi, hibah, atau pendapatan operasional lainnya. Pendapatan ini mencerminkan kapasitas entitas dalam menghasilkan dana untuk mendanai aktivitas operasionalnya.

2. Beban Operasional:

Beban operasional merupakan biaya yang dikeluarkan untuk menjalankan aktivitas operasional entitas. Beban ini mencakup berbagai hal, seperti biaya pegawai (gaji dan tunjangan), barang dan jasa (biaya pengadaan dan konsumsi), serta penyusutan aset tetap. Beban ini sangat penting untuk dihitung dan dilaporkan agar entitas dapat memantau penggunaan anggaran secara tepat.

3. Surplus atau Defisit:

Setelah pendapatan dan beban operasional dihitung, langkah selanjutnya adalah menghitung surplus atau defisit. Surplus terjadi jika pendapatan lebih besar dari beban, sedangkan defisit terjadi jika beban lebih besar dari pendapatan. Surplus menunjukkan bahwa entitas memiliki dana lebih untuk digunakan pada periode berikutnya atau untuk investasi, sementara defisit menunjukkan ketidakseimbangan keuangan yang perlu diperbaiki.

4. Evaluasi Kinerja Keuangan:

Laporan operasional berfungsi untuk menilai kinerja keuangan suatu entitas dalam mengelola anggaran. Dengan membandingkan pendapatan dan beban, pihak yang berkepentingan dapat mengevaluasi apakah entitas tersebut dapat mengelola

anggarannya secara efektif dan efisien. Hal ini juga memberikan gambaran tentang kesehatan keuangan entitas tersebut.

Fungsi Laporan Operasional:

- **Transparansi dan Akuntabilitas**
Laporan operasional memberikan gambaran yang jelas tentang bagaimana entitas menggunakan dana yang tersedia. Hal ini penting untuk menjaga akuntabilitas kepada pemangku kepentingan, baik itu masyarakat, pemerintah, maupun lembaga audit.
- **Pengambilan Keputusan**
Bagi manajemen atau pihak yang berkepentingan, laporan operasional dapat digunakan sebagai dasar untuk mengambil keputusan strategis, baik dalam hal alokasi anggaran, perencanaan program, maupun perbaikan operasional di masa mendatang.
- **Evaluasi Kinerja:**
Laporan ini juga memungkinkan evaluasi kinerja entitas dalam menjalankan program-programnya. Jika entitas mengalami defisit atau ketidakseimbangan keuangan, maka perlu dilakukan langkah-langkah perbaikan agar entitas dapat tetap bertahan secara fiskal.

Penyusunan Neraca Saldo:

Neraca saldo adalah sebuah daftar yang berisi saldo-saldo semua akun yang ada dalam buku besar perusahaan atau entitas pada suatu periode akuntansi tertentu. Neraca saldo berfungsi untuk memastikan bahwa pencatatan transaksi yang dilakukan dalam sistem akuntansi telah dilakukan dengan benar, dengan cara membandingkan jumlah total saldo debit dan saldo kredit.

Proses Penyusunan Neraca Saldo:

1. **Pengumpulan Data Akun**
Langkah pertama dalam penyusunan neraca saldo adalah mengumpulkan semua data yang terkait dengan akun-akun yang tercatat dalam buku besar. Buku besar ini mencatat transaksi-transaksi yang dilakukan oleh entitas, yang biasanya terbagi dalam berbagai kategori akun, seperti kas, piutang, utang, pendapatan, beban, dan lain-lain.
2. **Mencatat Saldo Debit dan Kredit**
Setelah mengumpulkan data akun, langkah selanjutnya adalah mencatat saldo debit dan kredit untuk setiap akun yang ada. Debit menunjukkan jumlah yang dicatat pada sisi kiri akun, sedangkan kredit tercatat pada sisi kanan akun. Setiap transaksi akuntansi akan mempengaruhi dua akun atau lebih, yang masing-masing akan mencatat jumlah debit dan kredit sesuai dengan prinsip akuntansi berpasangan (double-entry).
3. **Menjaga Keseimbangan Debit dan Kredit**
Neraca saldo berfungsi untuk memeriksa keseimbangan antara total saldo debit dan saldo kredit. Jika jumlah saldo debit dan kredit tidak sama, hal ini menunjukkan adanya kesalahan pencatatan yang perlu segera diperbaiki. Kesalahan tersebut dapat terjadi karena kelalaian dalam memasukkan angka, transaksi yang terlewat, atau pencatatan yang tidak sesuai.
4. **Melakukan Penyesuaian**
Jika ditemukan ketidakseimbangan antara saldo debit dan kredit, maka diperlukan penyesuaian. Proses penyesuaian ini dilakukan dengan memperbaiki kesalahan pencatatan dalam buku besar. Setelah penyesuaian, neraca saldo harus seimbang antara total debit dan kredit. Neraca saldo yang seimbang ini menjadi dasar untuk

menyusun laporan keuangan lainnya, seperti neraca, laporan laba rugi, dan laporan perubahan modal.

Tujuan Penyusunan Neraca Saldo:

- **Memastikan Keseimbangan Keuangan**
Neraca saldo memastikan bahwa saldo debit dan kredit sesuai, yang menunjukkan bahwa pencatatan transaksi telah dilakukan dengan benar dan tidak ada kesalahan yang signifikan pada proses akuntansi.
- **Dasar Penyusunan Laporan Keuangan**
Laporan laba rugi dan laporan perubahan modal, yang akan digunakan untuk mengevaluasi kinerja keuangan perusahaan, akan didasarkan pada neraca saldo yang telah disusun dan diperbaiki.
- **Meminimalkan Kesalahan Akuntansi**
Neraca saldo berfungsi sebagai alat untuk mengurangi dan menemukan kesalahan dalam proses pencatatan transaksi, sebelum kesalahan tersebut berdampak pada laporan keuangan yang lebih besar.



Gambar 1. Pengerjaan Tugas



Gambar 1. Print

Kesimpulan

Menegaskan bahwa pengelolaan dana bantuan pertanian oleh Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan Kabupaten Jember memiliki peranan yang sangat krusial dalam mendukung keberlanjutan dan pengembangan sektor pertanian di daerah tersebut. Efektivitas

penggunaan dana bantuan sangat bergantung pada efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas dalam proses perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan anggaran. Penelitian ini menunjukkan bahwa meskipun dana bantuan diharapkan dapat meningkatkan produktivitas pertanian dan kesejahteraan petani, tantangan dalam pengelolaan yang tidak tepat sasaran dapat menghambat pencapaian tujuan tersebut.

Dari hasil analisis, ditemukan bahwa pengelolaan yang efisien dan transparan sangat penting untuk memastikan bahwa dana digunakan sesuai dengan tujuan yang diharapkan. Pengawasan yang ketat dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana juga diperlukan untuk mencegah penyalahgunaan dan memastikan bahwa bantuan yang diberikan benar-benar sampai kepada petani yang membutuhkan. Selain itu, evaluasi dan pengawasan yang berkelanjutan terhadap proses pengelolaan dana bantuan sangat penting untuk mengidentifikasi apakah pengelolaan yang dilakukan sudah sesuai dengan harapan dan tujuan yang telah ditetapkan.

Penelitian ini juga mengungkapkan bahwa pengelolaan dana bantuan yang tidak tepat sasaran atau tidak efisien dapat menyebabkan dana tersebut tidak dapat dimanfaatkan secara maksimal, bahkan dapat berdampak buruk bagi petani yang seharusnya memperoleh manfaat dari bantuan tersebut. Oleh karena itu, penting untuk melakukan analisis mendalam mengenai bagaimana dana bantuan pertanian dikelola, alokasi dan distribusinya, serta dampak yang dihasilkan terhadap hasil pertanian dan peningkatan kesejahteraan petani.

Dengan demikian, rekomendasi untuk perbaikan dalam pengelolaan dana bantuan pertanian di masa mendatang sangat diperlukan. Diharapkan, dengan pengelolaan yang lebih baik, dana bantuan dapat lebih efektif dalam meningkatkan kesejahteraan petani dan ketahanan pangan di Kabupaten Jember. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pengembangan kebijakan dan praktik pengelolaan dana bantuan pertanian yang lebih baik di masa yang akan datang.

Ucapan Terima Kasih

Ucapan terima kasih kami sampaikan dengan penuh rasa syukur kepada semua pihak yang telah berkontribusi dalam pelaksanaan penelitian ini. Pertama-tama, kami mengucapkan terima kasih kepada Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan Kabupaten Jember yang telah memberikan akses dan dukungan yang sangat berarti selama proses pengumpulan data. Tanpa kerjasama dan bantuan dari pegawai dinas, penelitian ini tidak akan dapat terlaksana dengan baik.

Kami juga ingin mengucapkan terima kasih kepada para petani penerima bantuan yang telah bersedia meluangkan waktu untuk berbagi pengalaman dan informasi yang sangat berharga. Kesediaan mereka untuk berbicara tentang proses pengelolaan dana bantuan pertanian memberikan wawasan yang mendalam dan membantu kami memahami tantangan serta harapan yang mereka hadapi dalam meningkatkan kesejahteraan mereka.

Selain itu, kami berterima kasih kepada rekan-rekan peneliti dan akademisi yang telah memberikan masukan dan saran yang konstruktif selama proses penelitian ini. Dukungan moral dan intelektual dari mereka sangat membantu dalam memperkaya perspektif kami mengenai pengelolaan dana bantuan pertanian.

Terakhir, kami juga ingin mengucapkan terima kasih kepada keluarga dan teman-teman yang selalu memberikan dukungan dan motivasi selama proses penelitian ini. Tanpa dukungan dari semua pihak, penelitian ini tidak akan dapat diselesaikan dengan baik. Semoga hasil penelitian ini dapat memberikan manfaat bagi pengembangan kebijakan dan praktik pengelolaan dana bantuan pertanian di masa mendatang.

Referensi

- Asep, M. (2019). "Model Evaluasi Kinerja dengan Pendekatan Data Kinerja pada Instansi Pemerintah Daerah". *Jurnal Administrasi Publik*, 14(3), 123-135.
- Aziz, A., & Suryani, D. (2020). Peran Bantuan Pemerintah dalam Meningkatkan Produksi Pangan di Indonesia. *Jurnal Ekonomi Pertanian*, 12(3), 112-119.
- Budi, I., & Hasanah, S. (2020). Evaluasi Realisasi Anggaran Bantuan Pemerintah pada Sektor Pertanian di Indonesia. *Jurnal Keuangan dan Pembangunan*, 14(2), 90-97.
- Kuncoro, M. (2019). *Perencanaan Pembangunan Ekonomi*. Yogyakarta: Andi Mulyadi, D. (2019). *Akuntansi Pemerintahan*. Jakarta: Salemba Empat.
- Mardiasmo, M. (2018). *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: Andi.
- Nasution, M., & Siahaan, R. (2020). "Penyusunan Laporan Operasional dalam Pengelolaan Anggaran Publik: Studi Kasus pada Pemerintah Daerah". *Jurnal Akuntansi dan Keuangan*, 14(2), 87-103.
- Peraturan Bupati Jember Nomer 5 Tahun 2023, di akses 10 Februari 2025.
- Pratama, R., & Lestari, W. (2021). Manajemen Pengelolaan Dana Bantuan Pemerintah untuk Sektor Pertanian di Indonesia. *Jurnal Manajemen Keuangan Pertanian*, 9(1), 45-52.
- Purnomo, A., & Sutrisno, M. (2021). "Peranan Neraca Saldo dalam Menyusun Laporan Keuangan". *Jurnal Akuntansi dan Keuangan*, 12(3), 45-57.
- Rahmawati, E. (2020). *Manajemen Keuangan Daerah*. Yogyakarta: UGM Press.
- Salim, A. (2016). *Ekonomi Pembangunan*. Jakarta: Salemba Empat.
- Sinaga, D., & Lestari, M. (2021). "Peran Data Kinerja dalam Meningkatkan Akuntabilitas Pemerintahan Daerah". *Jurnal Manajemen Pemerintahan*, 12(4), 45-59.
- Sulastri, Y., & Wulandari, D. (2020). "Penyusunan Laporan Realisasi Anggaran dan Dampaknya terhadap Pengelolaan Keuangan Daerah". *Jurnal Manajemen Keuangan Publik*, 7(3), 223-237.
- Sumarwan, U. (2012). *Metode Penelitian untuk Bisnis dan Ekonomi*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Suwito, R., & Indriani, S. (2020). Analisis Realisasi Anggaran dalam Sektor Pemerintahan dan Pengaruhnya terhadap Pembangunan Ekonomi. *Jurnal Ekonomi dan Keuangan*, 15(1), 75-82.
- Suyanto, R. (2017). *Manajemen Keuangan Publik*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Wibowo, A. (2020). *Pengelolaan Keuangan Negara*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.